



## **Transformasi Kebijakan PAI Menuju Moderasi Beragama**

**Dina Kamilia<sup>1</sup>, Saiful Hadi<sup>2</sup>, Juhairiyah<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia

E-mail : [dk650949@gmail.com](mailto:dk650949@gmail.com)<sup>1</sup> , [saifulhadi.iainmadura@gmail.com](mailto:saifulhadi.iainmadura@gmail.com)<sup>2</sup> ,  
[juhairiyahadiba@gmail.com](mailto:juhairiyahadiba@gmail.com)<sup>3</sup>

---

Received: 17-11-2025

Revised: 27-12-2025

Accepted: 11-01-2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

### **Transformation of Islamic Religious Education Policy Towards Religious Moderation**

**Abstract.** The changing times bring new challenges for religious education, particularly the emergence of extreme and intolerant religious attitudes among some members of society. This condition highlights the need for a new approach to religious education that is more open and contextual. Therefore, PAI policies need to adapt to the digital era by utilizing technology in the dissemination of moderation values and strengthening critical and wise religious literacy. This research uses qualitative research thru a literature study (Library Research) approach, which involves gathering information from several books, journals, and other references relevant to the topic or problem under discussion. The research results indicate that the reform of Islamic Religious Education (PAI) policies toward religious moderation has produced positive changes while also providing valuable lessons for the future of Islamic education in Indonesia. The success achieved serves as a strong foundation for taking further steps in building a religious and tolerant society.

**Keywords:** Transformation, Islamic Education Policy, Religious Moderation.

**Abstrak.** Perubahan zaman membawa tantangan baru bagi pendidikan agama, khususnya munculnya sikap keagamaan yang ekstrem dan intoleran di kalangan sebagian masyarakat. Kondisi ini menyoroti perlunya pendekatan baru terhadap pendidikan agama yang lebih terbuka dan kontekstual. Oleh karena itu, kebijakan

PAI perlu beradaptasi dengan era digital dengan memanfaatkan teknologi dalam penyebaran nilai-nilai moderasi dan penguatan literasi keagamaan yang kritis dan bijaksana. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui pendekatan studi pustaka (Riset Perpustakaan), yang melibatkan pengumpulan informasi dari beberapa buku, jurnal, dan referensi lain yang relevan dengan topik atau masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) menuju moderasi keagamaan telah menghasilkan perubahan positif sekaligus memberikan pelajaran berharga bagi masa depan pendidikan agama Islam di Indonesia. Keberhasilan yang dicapai menjadi landasan yang kuat untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam membangun masyarakat yang religius dan toleran.

**Kata Kunci:** Transformasi, Kebijakan Pendidikan Islam, Moderasi Keagamaan.

## PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) berfungsi sebagai landasan utama dalam pembentukan moral dan spiritual peserta didik di Indonesia. Dalam masyarakat yang majemuk, PAI tidak sekadar menyampaikan ajaran agama, tetapi juga berperan membentuk karakter yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.<sup>1</sup> Oleh karena itu kebijakan dalam bidang PAI perlu terus diperbaharui agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang dinamis.

Perkembangan zaman membawa tantangan baru bagi pendidikan agama, terutama munculnya sikap keberagamaan yang ekstrem dan tidak toleran di kalangan sebagian masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan perlunya pendekatan baru dalam pembelajaran agama yang lebih terbuka dan kontekstual.<sup>2</sup> Transformasi kebijakan PAI menjadi langkah penting untuk mewujudkan pendidikan agama yang menanamkan nilai keseimbangan, keterbukaan, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Transformasi kebijakan PAI dimaksudkan untuk menata kembali arah, isi, serta strategi pembelajaran agar lebih relevan dengan semangat moderasi beragama. Perubahan ini tidak hanya berwujud pada penyesuaian kurikulum, tetapi juga mencakup pembenahan sistem pembelajaran, peningkatan kapasitas guru, dan pengembangan materi ajar yang menumbuhkan sikap moderat dengan tujuan mencetak generasi muslim yang taat beragama sekaligus mampu hidup harmonis di tengah masyarakat yang heterogen.<sup>3</sup>

Perjalanan reformasi kebijakan PAI di Indonesia dapat dilihat dari perubahan kurikulum yang terus disempurnakan, mulai dari kurikulum 2013 hingga Kurikulum Merdeka. Keduanya mengusung semangat pembentukan karakter dan nilai toleransi

---

<sup>1</sup> Rahmad Fauzi Lubis, "Harmoni Spiritualitas: Menggali Fungsi PAI di Sekolah," *Abdussalam: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam* 1, no. 1 (2025): 17.

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Muhamad Ansori, "Transformasi Kurikulum PAI di Era Merdeka Belajar: Antara Tantangan dan Peluang," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 7568.

dalam proses pendidikan.<sup>4</sup> Dalam konteks PAI, transformasi tersebut diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai moderasi beragama melalui pengajaran yang menyeimbangkan aspek spiritual, sosial, dan moral.

Moderasi beragama merupakan gagasan penting yang dikembangkan Kementerian Agama sebagai upaya menanamkan pemahaman keagamaan yang seimbang. Konsep ini menolak segala bentuk ekstremisme dan menekankan pentingnya bersikap adil, toleran, serta menghormati perbedaan.<sup>5</sup> Dalam kebijakan PAI, nilai-nilai ini diwujudkan melalui kurikulum, kegiatan pembelajaran, dan materi ajar yang menumbuhkan sikap saling menghargai antarumat beragama.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah melalui Kementerian Agama menggagas berbagai program penguatan moderasi beragama dalam bidang pendidikan. Upaya tersebut mencakup pelatihan guru PAI, penyusunan modul pembelajaran moderatif, serta penguatan peran madrasah dan sekolah dalam menanamkan nilai toleransi.<sup>6</sup> Langkah-langkah tersebut menjadi bagian integral dari transformasi kebijakan PAI menuju sistem pendidikan yang lebih inklusif.

Meski demikian, penerapan kebijakan PAI yang berorientasi pada moderasi beragama belum sepenuhnya berhasil. Hambatan masih muncul, baik dari sisi sumber daya manusia, keterbatasan pemahaman guru, maupun perbedaan persepsi terhadap makna moderasi itu sendiri.<sup>7</sup> Hal ini menandakan bahwa perubahan kebijakan perlu diikuti dengan pembinaan, pendampingan, dan perubahan pola pikir di kalangan pendidik serta peserta didik.

Dari sudut pandang kebijakan publik, transformasi PAI menuju moderasi beragama memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat. Sebuah kebijakan hanya akan efektif jika didukung partisipasi semua pihak dan disusun berdasarkan data serta hasil kajian ilmiah. Karena itu, penting dilakukan analisis mendalam terhadap arah dan dampak transformasi kebijakan PAI agar penerapannya benar-benar mampu memperkuat nilai moderasi.

Metode *library research* menjadi pendekatan yang tepat untuk menelaah transformasi kebijakan PAI. Dengan menelusuri berbagai dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan literatur kebijakan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan dan arah perubahan PAI di Indonesia. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi pola kebijakan yang efektif dalam menanamkan nilai moderasi beragama.

Kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk melihat kesinambungan dan perubahan arah kebijakan PAI dari waktu ke waktu. Dengan meninjau berbagai sumber akademik, dapat dipahami bagaimana kebijakan PAI berevolusi dari pendekatan yang normatif menuju paradigma yang lebih humanis dan dialogis.

---

<sup>4</sup> Abdul Hayi dan Mohamad Alwi, "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia di Era Reformasi," *Fitrah: Jurnal studi Pendidikan* 14, no. 1 (2023): 90.

<sup>5</sup> Firmanda Taufiq dan Ayu Maulida Alkholiq, "Peran Kementerian Agama dalam Mempromosikan Moderasi Beragama di Era Digital," *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 2 (2021): 139

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Laila Wardati et.al. "Pembelajaran Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama: Analisis Kebijakan, Implementasi, dan Hambatan." *Fitrah: Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (2023): 175.

Dengan begitu, penelitian ini dapat menggambarkan proses transformasi PAI sebagai bagian dari upaya memperkuat harmoni sosial di Indonesia.

Selain aspek kebijakan, dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi juga turut memengaruhi dunia pendidikan, termasuk PAI. Akses informasi yang luas membawa dampak pada pola keberagamaan generasi muda. Untuk itu, kebijakan PAI perlu beradaptasi dengan era digital dengan cara memanfaatkan teknologi dalam penyebaran nilai-nilai moderasi serta memperkuat literasi keagamaan yang kritis dan bijak.<sup>8</sup>

Moderasi beragama dalam konteks PAI tidak hanya menyangkut toleransi antarumat, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir rasional, empati sosial, dan keterbukaan terhadap perbedaan di internal umat Islam sendiri. Oleh sebab itu, pembelajaran PAI harus diarahkan untuk melatih peserta didik memahami ajaran agama secara mendalam, namun tetap fleksibel dan menghargai pandangan yang berbeda.

Transformasi kebijakan PAI juga bergantung pada peran dan kompetensi guru sebagai pelaksana utama di lapangan. Guru PAI menjadi agen penting dalam membentuk karakter moderat peserta didik. Karena itu, pelatihan dan pengembangan profesional guru menjadi aspek krusial dalam mewujudkan transformasi kebijakan PAI yang berbasis moderasi beragama.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang arah perubahan kebijakan PAI di Indonesia. Dengan menelaah berbagai literatur, regulasi, dan dokumen kebijakan, penelitian ini bertujuan mengungkap sejauh mana nilai-nilai moderasi telah diintegrasikan dalam pendidikan agama, serta menilai efektivitasnya dalam menciptakan generasi yang toleran dan berkarakter.

Secara keseluruhan, penelitian berjudul “Transformasi Kebijakan PAI Menuju Moderasi Beragama” ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan akademisi untuk terus memperkuat arah pendidikan agama yang damai, inklusif, dan selaras dengan semangat kebangsaan Indonesia yang beragam.

## PEMBAHASAN

### Konsep dan Arah Reformasi Kebijakan PAI

Reformasi kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia muncul sebagai respons terhadap dinamika sosial dan keagamaan yang semakin kompleks. PAI kini tidak hanya berfungsi menyampaikan ajaran agama secara kognitif, melainkan juga diarahkan untuk membentuk karakter peserta didik yang berwawasan moderat, terbuka, dan menghargai keberagaman. Upaya reformasi ini menandakan pergeseran paradigma pendidikan agama dari sekadar pembelajaran teks menuju penguatan nilai-nilai sosial dan moral yang menumbuhkan harmoni.

Secara konseptual, reformasi kebijakan PAI berlandaskan pada nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin, yaitu Islam yang membawa kedamaian bagi seluruh umat

---

<sup>8</sup> Ahmad Manshur dan Farida Isroani, “Tantangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Era Digital,” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 4 (2023):351.

manusia. Konsep ini diterjemahkan ke dalam prinsip moderasi beragama yang menekankan keseimbangan (*tawassuth*), keadilan (*'adl*), serta toleransi (*tasamuh*).<sup>9</sup> Melalui prinsip tersebut, kebijakan PAI diharapkan melahirkan peserta didik yang memahami agama secara proporsional tidak ekstrem, tidak liberal melainkan mampu bersikap tengah dan bijak dalam kehidupan beragama.

Arah utama reformasi PAI tampak dari perubahan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan reflektif. Peserta didik tidak lagi menjadi penerima pasif, tetapi didorong untuk berpikir kritis dan memahami nilai-nilai agama secara kontekstual.<sup>10</sup> Dengan demikian, pelajaran agama tidak berhenti pada hafalan, melainkan menjadi proses internalisasi nilai moderasi beragama dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Reformasi juga menyentuh aspek kompetensi pendidik.<sup>11</sup> Guru PAI berperan penting dalam menanamkan nilai moderatif kepada siswa, sehingga kebijakan baru menekankan penguatan profesionalisme dan pelatihan guru berbasis moderasi beragama. Melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama, guru diharapkan mampu menjadi teladan serta agen perubahan dalam mengembangkan sikap beragama yang toleran di lingkungan sekolah.

Selain peningkatan kualitas guru, pembaruan kurikulum menjadi salah satu wujud konkret reformasi kebijakan PAI. Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka misalnya, telah mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam kompetensi inti dan dasar.<sup>12</sup> Materi pelajaran kini tidak hanya berorientasi pada aspek ritual atau hukum agama, tetapi juga mengajarkan pentingnya sikap adil, menghargai perbedaan, serta peduli terhadap sesama. Hal ini menunjukkan perubahan arah pendidikan agama menuju penguatan karakter dan kemanusiaan.

Dari sisi regulasi, Kementerian Agama telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang memperkuat arah moderasi dalam pendidikan agama. Salah satunya melalui *Roadmap Moderasi Beragama (2019–2024)* yang menjadi pedoman nasional bagi lembaga pendidikan Islam. Dokumen ini menegaskan pentingnya menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan anti kekerasan dalam pendidikan.<sup>13</sup> Dengan demikian, kebijakan PAI berfungsi sebagai instrumen pembinaan karakter bangsa melalui pendekatan keagamaan yang damai.

Pelaksanaan reformasi kebijakan PAI juga diarahkan untuk memperkuat keterlibatan berbagai pihak. Pendidikan agama tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Berbagai kegiatan keagamaan di luar kelas, seperti pembinaan karakter dan kegiatan sosial, menjadi bagian penting dalam

---

<sup>9</sup> Mustaqim Hasan, "Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa," *Jurnal Mubtadiin* 7, no. 2 (2021): 111.

<sup>10</sup> Najmal Hadi Zain et,al. "Reformasi dan Arah Baru Pendidikan Agama Islam Masa Depan," *Invention: Journal Research and Education Studies* 6, no. 2 (2025): 500.

<sup>11</sup> Khoirul, "Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia Pasca Reformasi," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 11, no. 1 (2023):27.

<sup>12</sup> Muchamad Mufid, "Penguatan Moderasi Beragama dalam Proyek Profil Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin Kurikulum Merdeka Madrasah," *QuranicEdu: Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (2023): 148.

<sup>13</sup> M. Munif, "Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia," *Dirasah* 6, no. 2 (2023): 421.

menanamkan nilai moderasi secara langsung. Dengan cara ini, lembaga pendidikan diharapkan menjadi pusat pembelajaran nilai-nilai kebersamaan dan toleransi.<sup>14</sup>

Kemajuan teknologi digital turut menjadi bagian dari arah baru reformasi PAI. Di era informasi yang serba cepat, penyebaran ajaran agama melalui media daring tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu, kebijakan PAI mendorong penggunaan teknologi untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan yang menyejukkan dan menangkal konten radikal. Pemanfaatan media digital juga membuka ruang baru bagi guru dan siswa untuk berdialog serta memperdalam pemahaman keagamaan secara kreatif.

Arah reformasi PAI yang menekankan moderasi beragama juga berimplikasi pada penguatan identitas kebangsaan. Melalui pendidikan agama, peserta didik diharapkan mampu memadukan nilai-nilai Islam dengan semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sinergi ini menjadi pondasi bagi lahirnya generasi yang beragama secara benar sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan toleransi dalam kehidupan berbangsa.

Secara keseluruhan, reformasi kebijakan PAI di Indonesia menandai perubahan besar menuju sistem pendidikan agama yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada karakter moderat. Upaya ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan pendidikan agama sebagai sarana memperkuat kohesi sosial dan membangun kedamaian. Dengan arah kebijakan yang demikian, PAI diharapkan mampu melahirkan generasi yang religius, cerdas, serta memiliki kepedulian terhadap keberagaman dan kemanusiaan.

### **Evaluasi dan Pelajaran dari Praktik Kebijakan PAI Berbasis Moderasi Beragama**

Evaluasi terhadap penerapan kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis moderasi beragama menunjukkan adanya perkembangan positif dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan agama kini tidak hanya berfokus pada aspek kognitif dan dogmatis, tetapi juga diarahkan untuk menumbuhkan sikap moderat dan toleran pada peserta didik. Pendekatan pembelajaran yang kontekstual membantu siswa memahami nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial yang majemuk, sehingga PAI berperan penting dalam memperkuat harmoni antarumat beragama di Indonesia.

Salah satu faktor penting keberhasilan dari kebijakan ini adalah dukungan kuat dari pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama yang menekankan program *Moderasi Beragama* dan *Penguatan Pendidikan Karakter*. Kebijakan ini memberikan arah yang jelas bagi sekolah dan tenaga pendidik dalam mengembangkan pembelajaran yang tidak hanya menanamkan nilai keagamaan, tetapi juga semangat kebangsaan dan toleransi. Kolaborasi antara pihak sekolah, masyarakat, dan lembaga keagamaan turut mempercepat proses internalisasi nilai-nilai tersebut di lingkungan pendidikan.

Peran guru menjadi aspek krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan PAI yang moderat. Guru yang memiliki wawasan luas serta pemahaman mendalam mengenai konsep moderasi mampu mengajarkan agama dengan cara yang bijak dan

---

<sup>14</sup> Ibid

relevan dengan kehidupan modern.<sup>15</sup> Pelatihan dan peningkatan kompetensi guru yang dilakukan oleh pemerintah telah membantu memperkuat profesionalisme mereka sebagai pendidik sekaligus teladan dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan, empati, dan toleransi kepada siswa.

Dari sisi praktik di lapangan, penerapan moderasi beragama dalam PAI mulai tampak melalui kegiatan keagamaan yang bersifat inklusif dan membangun kebersamaan, seperti dialog antaragama, kerja sosial lintas komunitas, dan kajian tematik yang menekankan Islam sebagai agama rahmat. Kegiatan tersebut membuktikan bahwa pendidikan agama dapat menjadi media efektif untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian dan menghargai perbedaan secara nyata di kalangan peserta didik.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu persoalan utama adalah masih adanya perbedaan pemahaman di antara guru dan masyarakat tentang konsep moderasi beragama.<sup>16</sup> Tidak sedikit pendidik yang memaknai moderasi hanya sebatas toleransi antarumat beragama, tanpa memahami maknanya yang lebih luas sebagai keseimbangan antara keyakinan, keterbukaan, dan sikap adil terhadap keragaman.

Lingkungan sosial juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan ini. Di beberapa daerah, masih ditemukan pandangan keagamaan yang kaku dan eksklusif, yang berpotensi menolak nilai-nilai moderat.<sup>17</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan paradigma keagamaan membutuhkan proses yang berkelanjutan serta pendekatan edukatif yang persuasif agar moderasi dapat diterima secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, keterbatasan sarana, anggaran, dan sumber daya manusia masih menjadi hambatan yang sering dihadapi. Tidak semua sekolah memiliki akses yang sama terhadap pelatihan guru, buku ajar, dan media pembelajaran yang sesuai dengan prinsip moderasi. Akibatnya, sebagian lembaga pendidikan hanya menerapkan kebijakan secara formal tanpa mampu menggali nilai-nilai moderasi secara substansial. Hal ini menuntut perhatian lebih dari pemerintah agar pemerataan kualitas pendidikan agama dapat terwujud.

Aspek lain yang perlu diperkuat adalah sistem evaluasi kebijakan. Hingga kini, mekanisme pemantauan pelaksanaan kebijakan PAI berbasis moderasi beragama belum sepenuhnya terintegrasi antara Kementerian Agama, lembaga pendidikan, dan pengawas sekolah. Tanpa evaluasi yang jelas dan berkelanjutan, sulit untuk mengukur efektivitas program dalam menumbuhkan karakter moderat di kalangan siswa.<sup>18</sup> Oleh karena itu, sistem evaluasi yang terarah dan komprehensif menjadi kebutuhan mendesak dalam kebijakan ini.

---

<sup>15</sup> La Hadisi et.al, "Implementasi Peran Guru PAI dalam Membentuk Sikap Moderasi Beragama Siswa," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 3 (2024): 1897.

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Lista, et.al. "Pengaruh Lingkungan Sosial dan Pendidikan Terhadap Praktik Moderasi Beragama," *Capitalis: Journal of Social Sciences* 1, no. 1 (2023): 43.

<sup>18</sup> Hendra Harmi, "Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama," *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 7, no. 2 (2022): 232.

Dari hasil penerapan dan evaluasi tersebut, dapat dipetik sejumlah pelajaran penting (*lesson learned*). Pertama, nilai-nilai moderasi beragama tidak dapat hanya diajarkan dalam teori, tetapi harus dihidupkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari di lingkungan sekolah. Kedua, keberhasilan kebijakan bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang terbuka dan damai. Ketiga, setiap kebijakan harus bersifat adaptif terhadap perubahan zaman agar tetap relevan bagi generasi muda yang hidup di era digital dan global.

Secara keseluruhan, reformasi kebijakan PAI menuju moderasi beragama telah menghasilkan perubahan positif sekaligus memberikan pelajaran berharga bagi masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Keberhasilan yang dicapai menjadi dasar kuat untuk melangkah lebih jauh dalam membangun masyarakat yang religius dan toleran. Namun, tantangan yang masih dihadapi menunjukkan perlunya komitmen berkelanjutan dan inovasi dalam kebijakan, agar pendidikan agama benar-benar menjadi sarana efektif untuk memperkuat moderasi dan memperkokoh persatuan bangsa.

## KESIMPULAN

Reformasi kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia menunjukkan upaya nyata untuk menjadikan pendidikan agama lebih moderat, inklusif, dan relevan dengan dinamika sosial yang semakin kompleks. Arah kebijakan ini tidak lagi terbatas pada penyampaian materi keagamaan secara kognitif, tetapi menekankan penguatan karakter, sikap toleransi, dan pemahaman agama yang berimbang. Melalui penguatan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, serta dukungan regulasi seperti Roadmap Moderasi Beragama, PAI diarahkan menjadi instrumen pembinaan moral yang mampu menumbuhkan peserta didik yang berwawasan luas, menghargai keberagaman, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan.

Evaluasi implementasi kebijakan PAI berbasis moderasi beragama menunjukkan hasil positif, namun tetap menghadapi sejumlah tantangan. Dukungan pemerintah, peningkatan profesionalisme guru, dan pelaksanaan kegiatan keagamaan yang inklusif telah mendorong internalisasi nilai moderasi secara lebih efektif. Meski demikian, hambatan seperti perbedaan pemahaman, keterbatasan sarana, serta belum optimalnya sistem evaluasi menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan. Secara keseluruhan, pembelajaran dari praktik kebijakan ini menegaskan bahwa moderasi beragama hanya dapat terwujud melalui kolaborasi berkelanjutan antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah guna membangun ekosistem pendidikan yang damai, adaptif, serta mampu memperkuat persatuan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

Ansori, Muhamad "Transformasi Kurikulum PAI di Era Merdeka Belajar: Antara Tantangan dan Peluang," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025).

- Fauzi Lubis, Rahmad "Harmoni Spiritualitas: Menggali Fungsi PAI di Sekolah," *Abdussalam: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam* 1, no. 1 (2025).
- H.S., Lasa. *Kamus Kepustakawanan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009).
- Hadi Zain, Najmal et.al. "Reformasi dan Arah Baru Pendidikan Agama Islam Masa Depan," *Invention: Journal Research and Education Studies* 6, no. 2 (2025).
- Hadisi, La et.al, "Implementasi Peran Guru PAI dalam Membentuk Sikap Moderasi Beragama Siswa," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 3 (2024).
- Harmi, Hendra "Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama," *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 7, no. 2 (2022).
- Hasan, Mustaqim "Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa," *Jurnal Muftadiin* 7, no. 2 (2021).
- Hayi, Mohamad Alwi, Abdul "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia di Era Reformasi," *Fitrah: Jurnal studi Pendidikan* 14, no. 1 (2023).
- Khoirul, "Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia Pasca Reformasi," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 11, no. 1 (2023).
- Lista, et.al. "Pengaruh Lingkungan Sosial dan Pendidikan Terhadap Praktik Moderasi Beragama," *Capitalis: Journal of Social Sciences* 1, no. 1 (2023).
- Manshur, Farida Isroani, Ahmad "Tantangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Era Digital," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 4 (2023).
- Mufid, Muchamad "Penguatan Moderasi Beragama dalam Proyek Profil Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin Kurikulum Merdeka Madrasah," *QuranicEdu: Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (2023).
- Munif, M "Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia," *Dirasah* 6, no. 2 (2023).
- Taufiq, Ayu Maulida Alkholiq, Firmanda "Peran Kementerian Agama dalam Mempromosikan Moderasi Beragama di Era Digital," *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 2 (2021).
- Wardati, Laila et.al. "Pembelajaran Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama: Analisis Kebijakan, Implementasi, dan Hambatan." *Fitrah: Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (2023).